

ISSN: 1979-9241

# Jurnal poliprofesi

Volume: VIII No. 1 Agustus 2013

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekelompok Studi Kasus Pada PT. Palindo 1 (Persero) Cabang Belawan  
Audrey M. Siahaan, SE, M.Si, Akt

Indikator Stres Kerja dalam Pengajaran (Studi Kasus Di Akademi Manajemen Informatika Komputer Medan Business Polytechnic – Medan)  
Mardaus Purba

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Luas Lahan, Umur Dan Pengalaman Bertani Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Kentang Di Mardinding, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun  
Donny Ivan Samuel Simatupang

Stroberi dan Permasalahannya  
Lince Romauli Panatara

Manfaat Unsur Hara Makro Calcium (Ca) pada Tanaman Sinar Silaen

Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kedelai (*Glycine Max L Merrill*) Akibat Pemberian Kalsium (CaO) dan Beberapa Jenis Pupuk Kandang di Lahan Ultisol  
Tengku Boumedine Hamid Zulkifil, Erfan Wahyudi, Nazar Hidayat

Perhitungan Harga Pokok Produk Pesanan pada Perusahaan Industri Jasa  
Erna Susilawaty Sebayang

Pengaruh Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pengalokasian Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai  
Amran Manurung, SE, M.Si, Doris Kallimarti Ambarita, SE

Pendeteksian Kerusakan Komputer Menggunakan Metode Pemrosesan Analisa Hirarki  
Erbin Situmorang, S.Kom, M.M

Pengaruh Pendapatan terhadap Kesejahteraan Anggota pada CU. Horas Tebing Tinggi  
Bonifasius Tambunan, SE., M.Si., Akt

P  
O  
L  
I  
P  
R  
O  
F  
E  
S  
I



Diterbitkan oleh  
**POLITEKNIK POLIPROFESI MEDAN**

Jln. Sei-Batang Har No. 3 dan 4 Telp (061) 8446729-8446701 Medan  
Website: <http://www.ppm-poliprofesi.ac.id>

**Daftar Isi**

Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial sebagai Bentuk Tanggungjawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Sekitarnya  
Studi Kasus Pada PT. Pelindo I (Persero) Cabang Belawan  
**Audrey M. Siahaan, SE, M.Si, Akt**  
Halaman 1 s.d. 11

Indikator Stres Kerja dalam Pengajaran (Studi Kasus Di Akademi Manajemen Informatika Komputer Medan Business Polytechnic – Medan)  
**Mardaus Purba**  
Halaman 12 s.d. 27

Pengaruh Tingkat Pendidikan, Luas Lahan, Umur Dan Pengalaman Bertani Terhadap Tingkat Pendapatan Petani Kentang Di Mardinding, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun  
**Donny Ivan Samuel Simatupang**  
Halaman 28 s.d. 35

Stroberi dan Permasalahannya  
**Lince Romauli Panataria**  
Halaman 36 s.d. 49

Manfaat Unsur Hara Makro Calsium (Ca) pada Tanaman  
**Sihar Silaen**  
Halaman 50 s.d. 53

Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Kedelai (*Glycine Max L. Merrill*) Akibat Pemberian Kalsium (Ca0) dan Beberapa Jenis Pupuk Kandang di Lahan Ultisol  
**Tengku Boumedine Hamid Zulkifli<sup>1)</sup>, Erfan Wahyudi<sup>2)</sup>, Nazar Hidayat<sup>3)</sup>**  
Halaman 54 s.d. 72

Perhitungan Harga Pokok Produk Pesanan pada Perusahaan Industri Jasa  
**Erna Susilawaty Sebayang**  
Halaman 73 s.d. 83

Pengaruh Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pengalokasian Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai  
**Amran Manurung, SE, M.Si<sup>1)</sup>, Doris Kalimarti Ambarita, SE<sup>2)</sup>**  
Halaman 83 s.d. 97

Pendeteksian Kerusakan Komputer Menggunakan Metode Pemrosesan Analisa Hirarki  
**Erbin Sitorus, S.Kom, M.M**  
Halaman 98 s.d. 125

Pengaruh Pendapatan terhadap Kesejahteraan Anggota pada CU. Horas Tebing Tinggi  
**Bonifasius Tambunan, SE., M.Si., Akt**  
Halaman 126 s.d. 138



**PENGARUH PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP PENGALOKASIAN  
BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI**

**Amran Manurung, SE, M.Si<sup>1)</sup>, Doris Kalimarti Ambarita, SE<sup>2)</sup>**  
Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen Medan

*ABSTRACT*

*The research aims to describe the effect of the regional revenue and spending budget to the allocation of the regional spending in Serdang Badagai regency. This research is designed in using associative clause. The population of the research is employee office of regional revenue, finance and assets management and the regional chambers and uses purposive sampling as the methodical sample. The methodological research is taken through questionnaires, which is managed by statistic program. The researcher uses the type of classic assumption which consists of normality test, multicollinearity and heteroscedasticity test. Moreover the researcher also uses the partial significant test (t-test) and determinant coefficient (R<sup>2</sup>) to evaluation hypotheses.*

*This result shows that independent variables managing the process of the regional revenue and spending budget (APBD) significantly have positive effect to the dependent variables which are the allocations of the regional spending in Serdang Badagai Regional Government. The regression analysis in the value of R which loud to 0.608 shows the deep relation between the managing process of APBD and allocation of regional spending which 60.8%.*

*Keyword : Regional Government, regional revenue, expenditure budget, regional spending allocation*

**A. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, Undang-Undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat secara umum.

Anggaran Daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran daerah, pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa yang akan datang, sumber pengembangan



ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja. Melalui APBD, pemerintah daerah dapat menetapkan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Pencapaian prestasi kerja pemerintah daerah akan terlihat dari kemampuan mengalokasikan sumber daya dengan kata lain, penggunaan sumber daya sesuai dengan jumlah atau kuantitas yang dimiliki oleh daerah tersebut. Jadi, sangat penting bagi pemerintah daerah untuk berhati-hati dalam mengalokasikan anggarannya sebelum mengelola program-program dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut maka akan terjadi perubahan dalam sistem penganggaran Kabupaten Serdang Bedagai sebelum dan sesudah penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance budgeting*), dan pengalokasian anggaran belanja daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan sejauhmana alokasi anggaran belanja memperhatikan kepentingan pelayanan publik dan pelayanan aparatur pemerintah daerah.

## 1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan adanya uraian pada latar belakang sebelumnya, maka penulis merumuskan apa yang menjadi permasalahan sebagai berikut: Apakah ada pengaruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pengalokasian Belanja Daerah.

Untuk melihat apakah ada pengaruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap pengalokasian belanja daerah pada Pemkab Serdang Bedagai.

## B. LANDASAN TEORI

### 2.1. Penyusunan APBD

Menurut Tulis S. Meliala, et.al. bahwa: Sama halnya dengan penyusunan APBN, penyusunan APBD juga dimulai dengan pembentukan tim anggaran yang diketuai Sekretaris Wilayah yang beranggotakan Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Ketua BAPEDA, dan Kepala Biro Keuangan. Adapun proses pekerjaannya adalah Sekretaris Wilayah Anggota meminta rencana atau usulan Anggaran Pendapatan dan Biaya untuk Unit Kerja.<sup>4</sup>

Dalam penyusunan APBD pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan pendekatan kinerja. Dengan pendekatan kinerja, organisasi akan lebih memperhatikan aspek pencapaian kinerja dibanding sekadar penghematan biaya semata. Pendekatan ini menggeser penekanan penganggaran dari sebelumnya yang sangat berfokus pada pos belanja (*object of expenditure*) beralih pada kinerja terukur dari program kerja.

### 2.2. Penetapan Anggaran Daerah (APBD)

Penetapan anggaran merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada legislatif, selanjutnya DPRD akan melakukan

<sup>4</sup> Tulis S. Meliala, et.al, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 3: Penerbit Somesta Media, Jakarta, 2011, hal.13



pembahasan untuk beberapa waktu.

Penetapan APBD dilaksanakan dengan melalui tiga tahap sebagai berikut:

- a. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD
- b. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
- c. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

### 2.3. Belanja Daerah dan Pengalokasiannya

#### Belanja Daerah

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Nomor 02 Paragraf 8 dalam Abdul hafiz Tanjung (2009) menyebutkan: "Belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah".<sup>5</sup>

Dalam PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pasal 1 Poin 13 merumuskan: "Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah".<sup>6</sup>

#### Pengalokasian Belanja Daerah

Pengalokasian Belanja Daerah disusun berdasarkan Standar Analisa Belanja (SAB). Standar Analisa Belanja adalah perkiraan jumlah pengeluaran (alokasi dana) untuk setiap unit kerja pemerintah daerah, program kerja, dan atau unit kegiatan pemerintah daerah yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu tingkat pelayanan publik tertentu sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan Standar Analisa Belanja (SAB) tersebut, akan dimungkinkan munculnya identifikasi kebutuhan dana yang lebih akurat, baik untuk kegiatan rutin maupun kegiatan pembangunan.

Adapun pertimbangan yang perlu diputuskan dalam menerapkan Standar Analisa Belanja:

Pemulihan Biaya (cost recovery).

Keputusan untuk membuat atau membeli.

Keputusan-keputusan atas tingkat penyediaan jasa.

Keputusan-keputusan berdasarkan asas biaya manfaat.

Keputusan investasi.

### 2.4. Kerangka Konseptual

#### 2.4.1 Pengaruh Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Terhadap Alokasi Belanja Daerah

Studi tentang pengaruh penyusunan APBD terhadap Belanja Daerah sudah pernah dilakukan, sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Dewi Novika

---

<sup>5</sup>Abdul Hafiz Tanjung, Op.Cit., hal. 199

<sup>6</sup><http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2000/105TAHUN2000PP.HTM>



Arieyanti (2009), menyatakan bahwa terdapat pengaruh penyusunan APBD terhadap Belanja Daerah.

APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang memuat tentang rencana penerimaan, rencana pengeluaran serta pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran. Berdasarkan PP Nomor 105 Tahun 2000 APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu dan disusun dengan pendekatan kinerja.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang yang luas bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.<sup>7</sup>

Dengan berlakunya kedua undang-undang tersebut di atas, akan membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Penyusunan anggaran program dan kegiatan pemerintah daerah bersama dengan DPRD perlu menggunakan skala prioritas daerah agar sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ukuran anggaran berbasis kinerja yaitu seberapa besar anggaran dan program yang disusun itu disesuaikan dengan pelaksanaan atau tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran tetapi tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam hal ini kinerja pemerintah daerah bisa dikatakan baik apabila pada saat menyusun anggaran program dan kegiatan serta evaluasi dan pengendalian 3E yaitu efisien, efektif dan ekonomis artinya anggaran disusun harus mampu menjembatani aspirasi dan kepentingan daerah tersebut. Apabila kegiatan penyusunan APBD dilakukan dengan baik, maka akan terdapat peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, keadilan, pemerataan, keadaan yang semakin maju, serta terdapat keserasian antara pusat dan daerah serta antar daerah. Dikarenakan pada saat ini pemerintah menggunakan penganggaran berbasis pendekatan kinerja, maka reformasi anggaran diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran.

APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> <http://ahmadyasin.blogspot.com/2007/09/penyusunan-apbd-berbasis-kinerja.html>

<sup>8</sup> <http://karangtangis.blogspot.com/2011/02/proses-penyusunan-apbd-dan-perubahan.html>



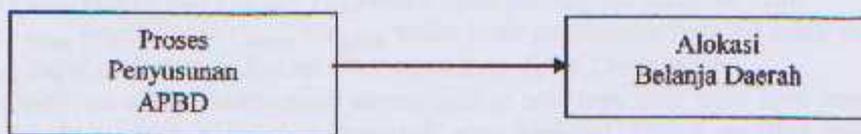
Pedoman Penyusunan Anggaran seperti tercantum dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 memuat antara lain:

1. Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.
2. Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran bersangkutan.
3. Teknis penyusunan APBD.
4. Hal-hal khusus lainnya.

Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Proses perencanaan dan penyusunan APBD, mengacu pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, secara garis besar sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran.
3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara.
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
5. Penyusunan rancangan perda APBD.
6. Penetapan APBD.

Gambar 2.3. Kerangka Konseptual Penelitian



### 2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka konseptual, dan landasan teori yang diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: “proses penyusunan APBD berpengaruh secara signifikan terhadap alokasi belanja daerah”.

## C. METODOLOGI PENELITIAN

### 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang beralamat di Jl. Negara No. 300 Sei Rampah, pada tanggal 10 Februari 2014.

### 3.2. Bahan dan Alat Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah kuesioner untuk mendapatkan data dalam hal mengevaluasi proses penyusunan APBD dan apakah ada pengaruhnya terhadap pengalokasian belanja daerah. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi software SPSS 20.0.

### 3.3 Kriteria Sampel

Adapun teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*, dimana dalam pengambilan sampel dengan menyesuaikan diri berdasarkan kriteria atau tujuan tertentu (disengaja). Dalam penelitian ini kriteria pengambilan sampel adalah: Pihak eksekutif yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah pada Pemkab Serdang Bedagai. Pihak legislatif, yaitu DPRD yang mengambil keputusan apakah RAPBD disetujui menjadi APBD yang digunakan sebagai dasar anggaran pada Pemkab Serdang Bedagai.

Adapun populasi penelitian adalah semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Serdang Bedagai.

### 3.4 Uji Statistik

#### 3.4.1 Pengujian Kualitas Data

Pengujian kualitas data meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan alat bantu program statistik, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Jika  $r_{hitung}$  positif dan  $r_{hitung} > r_{tabel}$  maka butir pertanyaan tersebut valid.
- 2) jika  $r_{hitung}$  negatif atau  $r_{hitung} < r_{tabel}$  maka butir pertanyaan tersebut tidak valid.
- 3)  $r_{hitung}$  dapat dilihat pada kolom *Corrected Item Total Correlation*.

Reliabilitas adalah konsistensi menunjukkan seberapa baik item-item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur konstruk atau variabel. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrument yang digunakan, peneliti menggunakan koefisien *Alpha Cronbach*. Instrumen dikatakan reliabel jika nilai *Alpha Cronbach* lebih besar dari 0,6.

#### 3.4.2 Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heterokedastisitas. Menurut Husein Umar: "Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen, atau keduanya berdistribusi normal mendekati normal atau tidak".<sup>9</sup>

Menurut Husein Umar: "Uji multikolinieritas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen".<sup>10</sup>

#### 3.4.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji signifikan parsial (uji - t) dan koefisien determinan ( $R^2$ ).

<sup>9</sup> Husein Umar, *Desain Penelitian Akuntansi Keperilakuan*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 79

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 82



**D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Uji Kualitas Data

4.1.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dan validitas tersebut masing-masing untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Ada dua prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengukur reliabilitas dan validitas. Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi antara skor butir dengan skor faktor harus berkorelasi positif, kemudian membandingkan  $r$  tabel dengan  $r$  hasil dari setiap pertanyaan. Nilai uji validitas, teknik yang digunakan adalah *Corrected Item-Total Correlation* ditunjukkan pada kolom *Corrected Item-Total Correlation* dari hasil pengujian dengan bantuan SPSS. Hasil pengujian tersebut akan diringkas pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1. Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Proses Penyusunan APBD (X)

Pertanyaan	<i>Corrected Item Total Correlation</i> ( $r_{hitung}$ )	$r_{tabel}$	Validitas
1	0,569	0,320	Valid
2	0,678	0,320	Valid
3	0,506	0,320	Valid
4	0,490	0,320	Valid
5	0,428	0,320	Valid

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel di atas, setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari  $r$  tabel. Berdasarkan hasil ini maka item variabel Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dapat disimpulkan lolos uji validitas. Selanjutnya pada pertanyaan mengenai alokasi belanja daerah dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan Variabel Alokasi Belanja Daerah (Y)

Pertanyaan	<i>Corrected Item Total Correlation</i> ( $r_{hitung}$ )	$r_{tabel}$	Validitas
1	0,517	0,320	Valid
2	0,621	0,320	Valid
3	0,572	0,320	Valid
4	0,412	0,320	Valid

Sumber: data diolah

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada tabel diatas, setiap item pertanyaan menghasilkan koefisien korelasi yang lebih besar dari  $r$  tabel. Berdasarkan hasil ini maka 4 item variabel Alokasi Belanja Daerah dapat disimpulkan lolos uji validitas karena  $r_{hitung} > r_{tabel}$ .



4.1.2. Pengujian Reliabilitas Data

Uji reliabilitas dengan melihat koefisien *cronbach alpha*. Nilai reliabilitas dilihat dari *cronbach alpha* masing-masing instrument penelitian jika memiliki *cronbach alpha* lebih besar dari 0,6 dianggap reliabel.

Tabel 4.3. Hasil Uji Reliabilitas Item Variabel Proses Penyusunan APBD (X)

Pertanyaan	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Cronbach Alpha	Reliabilitas
1	0,647	0,6	Reliabel
2	0,611	0,6	Reliabel
3	0,674	0,6	Reliabel
4	0,751	0,6	Reliabel
5	0,705	0,6	Reliabel

Sumber: data diolah

Selanjutnya pada pertanyaan mengenai alokasi belanja daerah dapat dilihat pada Tabel 4.4. sebagai berikut:

Tabel 4.4. Hasil Uji Reliabilitas Item Pertanyaan Variabel Alokasi Belanja Daerah (Y)

Pertanyaan	Cronbach's Alpha if Item Deleted	Cronbach Alpha	Reliabilitas
1	0,685	0,6	Reliabel
2	0,622	0,6	Reliabel
3	0,653	0,6	Reliabel
4	0,740	0,6	Reliabel

Sumber: data diolah

4.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas data dengan menggunakan *One sample kolmogorov-smirnov test*. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai *asymptotic significance (2-tailed)* adalah 0,030 untuk variabel X dan dibawah nilai signifikansi (0,05). Dengan kata lain variabel residual berdistribusi tidak normal. Sedangkan untuk variabel Y diperoleh nilai *asymptotic significance (2-tailed)* sebesar 0,051 dan nilai ini diatas nilai signifikansi (0,05) variabel residual berdistribusi normal.

Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X	Y
N		40	40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	19,98	15,93
	Std. Deviation	2,577	2,141
	Absolute	,229	,214
Most Extreme Differences	Positive	,121	,211
	Negative	-,229	-,214
Kolmogorov-Smirnov Z		1,448	1,353
Asymp. Sig. (2-tailed)		030	051

a. Test distribution is Normal.



### 4.2.2 Uji Multikolinieritas

Besaran Koefisien korelasi antarvariabel independen, yaitu X adalah 1,000. Terjadinya multikolinieritas jika nilai korelasi adalah tinggi, biasanya melebihi 0,80. Oleh karena itu, variabel dependen tidak terjadi multikolinieritas

Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficient Correlations<sup>a</sup>

Model		X
1	Correlations	X
	Covariances	X

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	X	.608	.608	.608	1,000	1,000

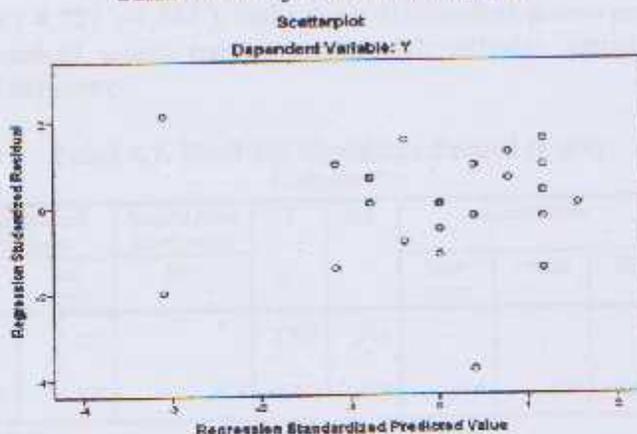
a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah

Mengukur multikolinieritas juga dapat diketahui dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*). Nilai  $R^2$  adalah sebesar 0,370, sementara VIF sebesar 1,000. Dengan demikian, besar VIF yang mendekati angka 1 mencerminkan tidak ada multikolinieritas.

### 4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.7. Uji Heterokedastisitas



		X	Y
N		40	40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	19,98	15,93
	Std. Deviation	2,577	2,141
	Absolute	,229	,214
Most Extreme Differences	Positive	,121	,211
	Negative	-,229	-,214
Kolmogorov-Smirnov Z		1,448	1,353
Asymp. Sig. (2-tailed)		,030	,051

a. Test distribution is Normal.

### 4.3 Uji Hipotesis

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan diperoleh kesimpulan bahwa model sudah dapat digunakan untuk melakukan pengujian analisa regresi sederhana, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Hipotesis yang akan diuji adalah pengaruh proses penyusunan APBD terhadap pengalokasian belanja daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

#### 4.3.1 Uji Signifikan Parsial (Uji-t)

Perhitungan regresi berganda ini dilakukan dengan menggunakan bantuan paket program komputer SPSS 20.0. Hasil dari perhitungan regresi diperoleh seperti Tabel 4.7.

Dari hasil pengujian secara individu nilai t hitung proses penyusunan APBD sebesar 4,727. Tabel distribusi t dicari pada tingkat signifikansi 0,05 dengan dengan uji 2 sisi dengan jumlah data (n) 40. Hasil yang diperoleh untuk t tabel sebesar 1,684.

Artinya :

t hitung > t tabel ( 4,727 > 1,684 ), maka dapat disimpulkan proses penyusunan APBD (variabel independen) secara parsial berpengaruh terhadap pengalokasian belanja daerah (variabel dependen).

**Tabel 4.7. Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji-t)**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
(Constant)	5,827	2,154		2,705	,010					
X	,506	,107	,608	4,727	,000	,608	,608	,608	1,000	1,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: data diolah



**3.3.2 Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)**

Hasil analisis determinasi dapat dilihat pada output Model Summary dari hasil analisis regresi linear berganda berikut.

**Tabel 4.8. Hasil Regresi Sederhana**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,827	2,154		2,705	,010
	X	,506	,107	,608	4,727	,000

Sumber: data diolah

R	=	0,608
R <sup>2</sup>	=	0,370
F	=	22,340
Sig.F	=	0,000

Nilai R pada intinya untuk mengukur seberapa besar hubungan antara independen variabel dengan dependen variabel. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai R sebesar 0,608, hal ini menunjukkan bahwa variabel Proses Penyusunan APBD mempunyai hubungan yang cukup erat dengan Pengalokasian Belanja Daerah.

Sedangkan nilai R square (R<sup>2</sup>) atau nilai koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> adalah diantara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel dependen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,370 mempunyai arti bahwa variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen sebesar 37%. Dengan kata lain 37% perubahan dalam Alokasi Belanja Daerah mampu dijelaskan variabel Proses Penyusunan APBD, dan sisanya sebesar 63% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,000. Karena probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka hasil dari model regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Proses Penyusunan APBD terhadap Pengalokasian Belanja Daerah pada Pemkab Serdang Bedagai. Dengan kata lain, model regresi layak dipakai untuk memprediksi tingkat Alokasi Belanja Daerah berdasarkan masukan variabel Proses Penyusunan APBD.

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan maka dapat dilihat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 5,827 + 0,506 X + e$$



Dari persamaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut terdapat variabel proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mempengaruhi pengalokasian belanja daerah, sehingga pengalokasian belanja daerah (Y) hanya sebesar 5,827. Koefisien regresi variabel proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) = 0,506, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel proses penyusunan APBD akan mendorong peningkatan pengalokasian belanja daerah sebesar 0,506.

Dari persamaan di atas, dapat dilihat bahwa koefisien dari variabel X (Proses Penyusunan APBD) menunjukkan angka positif. Berarti hubungan antara Proses Penyusunan APBD dengan Pengalokasian Belanja Daerah adalah positif, dalam arti semakin bagus atau berkualitas proses penyusunan APBD maka akan menghasilkan APBD yang berkualitas sehingga pengalokasian belanja daerah juga semakin tepat sesuai dengan yang dianggarkan.

#### **4.4. Pembahasan**

Dari hasil persamaan regresi linear sederhana dapat dilihat bahwa proses penyusunan APBD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian belanja daerah. Pengaruh variabel ini dikatakan kuat karena nilai sig. variabel adalah 0,000. Berpengaruh positif dan signifikan karena nilai sig. lebih kecil dari 0,05.

Dari data hasil ini dapat dikatakan bahwa dengan adanya peningkatan kualitas dalam proses penyusunan APBD maka pengalokasian belanja daerah juga semakin tepat sehingga tingkat pertumbuhan pembangunan pada Pemkab Serdang Bedagai akan semakin baik. Namun dengan adanya pengujian asumsi klasik, yakni uji normalitas diperoleh data bahwa variabel Proses Penyusunan Anggaran (X) tidak normal, dimana nilainya hanya sebesar 0,030, dan nilai ini lebih kecil dari nilai signifikansi yaitu sebesar 0,05. Hal ini terjadi dikarenakan pada saat penulis melakukan riset dan menyebar kuesioner kepada responden yang bersangkutan, terdapat beberapa kegiatan yang membuat sebagian responden tidak fokus, salah satunya yaitu kegiatan rapat dan penyelesaian laporan yang harus dirampungkan. Hal ini mempengaruhi konsentrasi responden dalam hal pengisian kuesioner yang telah diberikan oleh penulis. Kemungkinan lain adalah beberapa responden memiliki pengetahuan yang kurang memadai dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran di masing-masing SKPD dan responden tersebut belum mampu menetapkan indikator input, output, outcome dan indikator capaian program sesuai dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.

Pengalokasian belanja daerah pada awalnya hanya disesuaikan dengan belanja daerah pada periode sebelumnya sehingga tidak menciptakan efisiensi pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Namun ketika para pengambil keputusan menyadari bahwa kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya dapat diukur efektifitas dan efisiensinya, maka dalam penetapan alokasi belanja daerah diperlukan penjangkaran aspirasi masyarakat melalui DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh Proses Penyusunan APBD terhadap Pengalokasian Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa jika masing-masing pihak



yang terlibat dalam proses penyusunan APBD yang ada di Pemkab Sedang Bedagai menerapkan penyusunan APBD berbasis kinerja dengan baik, maka akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah pada tiap daerah.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat Pengaruh Proses Penyusunan APBD terhadap Pengalokasian Belanja Daerah. Hasil penelitian ini memberi kesimpulan sebagai berikut:

Hasil analisa data dengan menggunakan metode analisis regresi sederhana menunjukkan bahwa faktor proses penyusunan APBD (X) berpengaruh signifikan terhadap Pengalokasian Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Dari hasil penelitian dengan bentuk kuesioner didapat hasil bahwa Pengalokasian Belanja Daerah sebesar 37 % mampu dijelaskan variabel penerapan anggaran berbasis kinerja, dan sisanya sebesar 63 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.

Hasil analisa regresi sederhana secara keseluruhan menunjukkan R sebesar 0,608 yang berarti bahwa korelasi atau hubungan antara Proses Penyusunan APBD mempunyai hubungan yang kuat sebesar 60,8%.

### **5.2 Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan penulis kepada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

Dalam menghadapi berbagai tuntutan serta kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang, pemerintah harus lebih fokus dalam hal penataan dan pembentukan seluruh sumber daya manusia agar lebih berkualitas, dalam arti lebih mengerti dan memahami terkait dengan proses penyusunan anggaran dengan adanya penyusunan anggaran dengan berbasis kinerja. Pemerintah juga lebih memperhatikan pengalokasian belanja daerah dalam memenuhi pelayanan publik sebagai salah satu tujuan dari adanya kegiatan penyusunan anggaran.

Untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel lain yang berpengaruh lebih kuat terhadap pengalokasian belanja daerah. Misalnya variabel Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Perubahan Peraturan Pemerintah mengenai Pengalokasian Belanja Daerah, atau variabel lain yang dapat mempengaruhi pengalokasian belanja daerah.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Afiah, Nur, Nunuy, **Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2010.
- Arieyanti, Novika, Dewi, **Pengaruh Penyusunan APBD terhadap Alokasi Belanja Daerah di Pemkab Deli Serdang**, skripsi: Universitas Sumatera Utara, Medan, 2009.
- Bastian, Indra, **Akuntansi Sektor Publik**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006.
- Darise, Nurlan, **Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)**, Penerbit PT Indeks, Jakarta, 2008.
- Halim, Abdul, **Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi 3: penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2007.

